BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi pengadaan barang/jasa pemerintah, prinsip efektivitas sangat penting untuk memastikan bahwa proses pengadaan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, kebutuhan yang telah ditetapkan, dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan untuk kepentingan masyarakat, baik dari segi kualitas dan kuantitas pekerjaan, penyerahan pekerjaan yang tepat waktu, mampu bersinergi dengan barang/jasa lainnya, dan terwujudnya dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kebijakan atau program. Regulasi-regulasi terkait pengadaan barang/jasa pemerintah haruslah menjadi pedoman dalam pelaksanaannya guna meningkatkan kepatuhan dan menghindari kerugian keuangan negara akibat praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh para pihak yang berkontrak. Pembangunan program dan sasaran yang telah dilaksanakan pada akhirnya akan menjadi penilai masyarakat guna menilai kinerja pemerintah dan pelayanan publik. Efektivitas menjadi salah satu komponen good governance, sehingga dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang baik dalam pemerintahan akan selalu dituntut pelayanan publik yang efisien dan efektif. Implementasi regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, baik dari

aspek teknis, administratif, maupun sumber daya manusia wajib dilaksanakan guna terciptanya *good governance*. Kurangnya pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah akan menimbulkan akibat hukum dalam dimensi hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana sebagai konsekuensi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

2. Pencegahan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan dalam upaya preventif, dari hukum administrasi yang merupakan instrumen hukum utama berkaitan dengan tiga dimensi hukum administrasi, yaitu norma untuk, oleh dan terhadap pemerintah. Pengadministrasian dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan oleh para pihak yang berkontrak, hal itu juga merupakan salah satu cara untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara dan menghindari perbuatan melawan hukum bagi para pihak yang berkontrak. Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam pengadaan barang/jasa pemerintah guna mitigasi risiko pencegahan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi pengadaan barang/jasa pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, memberikan manfaat pembangunan yang maksimal bagi masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Penulis merekomendasikan kepada pembuat kebijakan untuk:

1. Para Pihak dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa wajib melaksanakan kewajibannya dan mengimplementasikan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, baik dari aspek teknis, administratif, maupun sumber daya manusia wajib guna terciptanya *good governance* dan melakukan mitigasi risiko pencegahan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.
2. Para Pihak wajib bertindak profesional, proporsional, menjaga akuntabilitas, dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah guna mencapai tujuan pembangunan negara dan meningkatkan kepercayaan publik dari masyarakat terhadap pemerintah.